

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan ini menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja



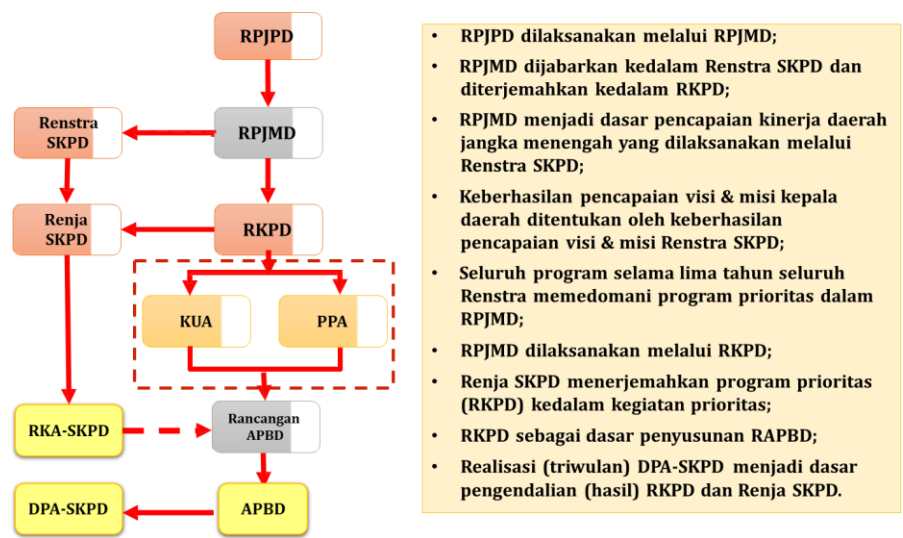
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi untuk lima tahun kedepan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang baik propinsi maupun nasional.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini :



Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA), sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);



28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- 1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
- 2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi;
- 2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
- 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi setiap tahunnya;
- 4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi; dan
- 5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

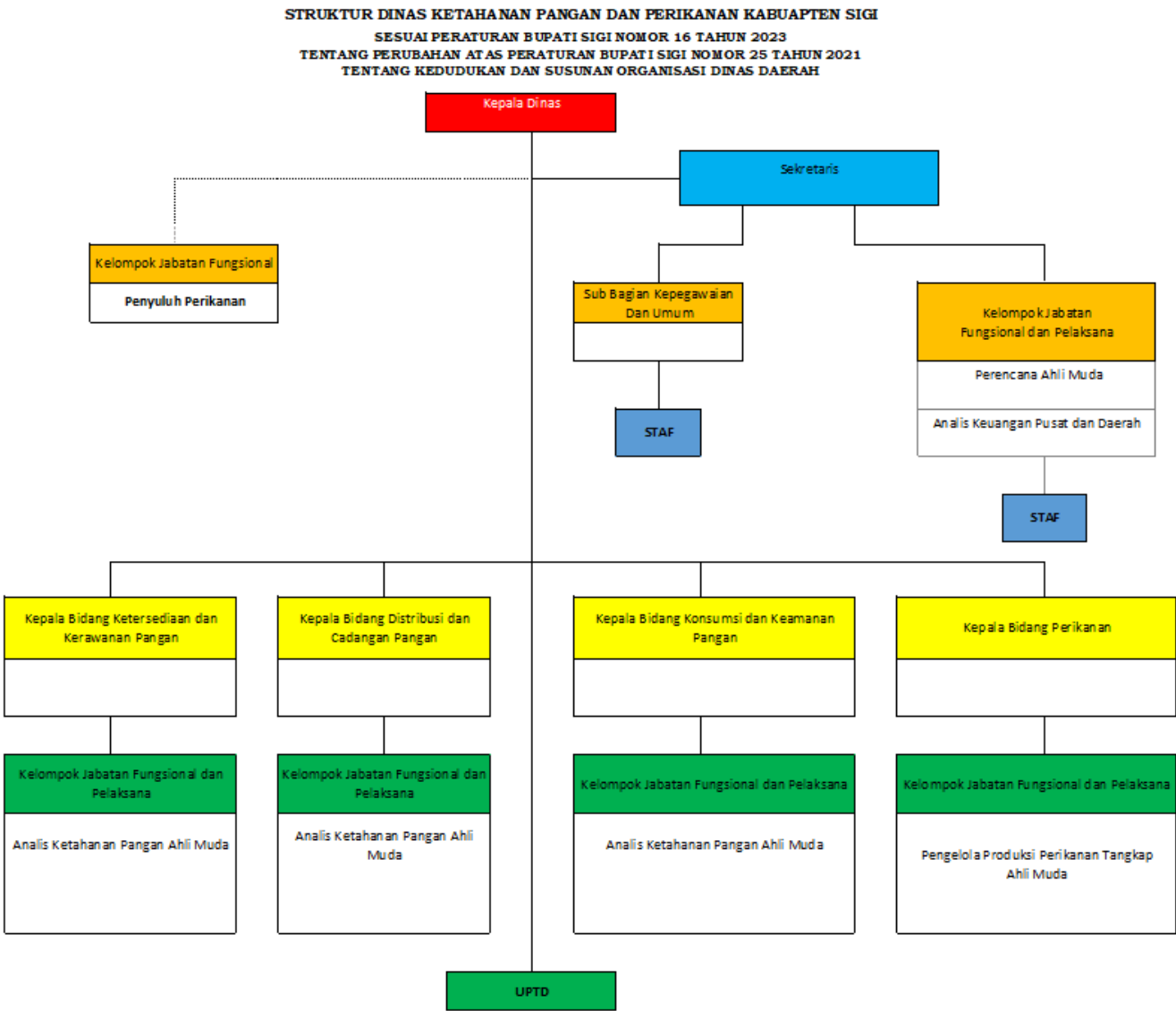
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Sigi





a. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pangan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- ✓ perumusan kebijakan dibidang pangan dan perikanan ;
- ✓ pelaksanaan kebijakan dibidang pangan dan perikanan ;
- ✓ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan dan perikanan ;
- ✓ pelaksanaan administrasi dibidang pangan dan perikanan ; dan
- ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 28 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan dan Aset ; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 - a) Seksi Ketersediaan Pangan ;
 - b) Seksi Sumber Daya Pangan ; dan
 - c) Seksi Kerawanan pangan .
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
 - a) Seksi Distribusi Pangan ;
 - b) Seksi Harga Pangan ; dan
 - c) Seksi Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - a) Seksi Konsumsi Pangan ;
 - b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan ; dan
 - c) Seksi Keamanan Pangan .



6. Bidang Perikanan, membawahi:

- a) Seksi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan ;
- b) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Ikan ; dan
- c) Seksi Konservasi Perairan Umum Daratan dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan .

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pangan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) **Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. penyiapan peraturan perundang -undangan di bidang pangan dan perikanan sesuai dengan norma, standar , prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik Negara/Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencanaprogram kerja, rencana anggaran, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ;
- penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi keuangan, penatausahaan aset dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan koordinasi , penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
- penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain -lain;
- fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain -lain;
- perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan ;



- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , membawahi:

a. Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang ketersediaan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang ketersediaanpangan;
- penyiapan bahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang ketersediaan pangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan teknis ketersediaan pangan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- penyiapan bahan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- penyiapan bahan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaanpangan;
- penyiapan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan;



- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

b. Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang sumber daya pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang sumber daya pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang sumber daya pangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang sumber daya pangan;
- penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sumber daya pangan;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya pangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

c. Seksi Kerawanan Pangan .

Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang kerawanan pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang kerawananpangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kerawanan pangan;



- penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- penyiapan bahan intervensi Daerah rawan pangan;
- penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan ;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kerawanan pangan;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

(4) **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:

a. Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang distribusi pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang distribusi pangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang distribusi pangan;
- penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- penyiapan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

b. Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang harga pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang harga pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang harga pangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang harga pangan;
- penyiapan bahan analisis di bidang harga pangan;
- penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;



- penyiapan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang harga pangan;
- penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang harga pangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

c. Seksi Cadangan Pangan .

Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakandibidang cadangan pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang cadanganpangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang cadangan pangan;
- penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang cadangan pangan;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang cadanganpangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.



(5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan , membawahi:

- a. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang konsumsipangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang konsumsi pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang konsumsipangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan koordi nasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang konsumsi pangan;
- penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;



- penyiapan penghitung tingkat konsumsi energy dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
- penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;



- penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
- c. Seksi Keamanan Pangan .
- Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang keamanan pangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang keamanan pangan;
 - penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang keamananpangan;
 - penyiapan bahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang keamanan pangan;
 - penyiapan bahan analisis di bidang keamanan pangan;
 - penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yangberedar;
 - penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangansegar;
 - penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamananpangan;
 - penyiapan bahan pendampingan di bidang keamanan pangan;
 - penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang keamanan pangan;
 - penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang keamanan pangan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindak an yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.



(6) Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perikanan;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perikanan;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangandibidang perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perikanan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Membawahi:

- a. Seksi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan;

Seksi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan kesehatan ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan kesehatan ikan ;
- menyiapkan bahan pemberia n petunjuk teknis dibidang perikanan budidaya dan kesehatan ikan ;
- menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya dan kesehatan Ikan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan k egiatan perikanan budidaya dan kesehatan ikan dengan unit kerja terkait;



- penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
- penyiapan bahan rencana pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
- pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
- penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- pelaksanaan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit dan komoditas perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
- pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;
- penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perikanan budidaya dan kesehatan ikan ;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan kesehatan ikan ;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

b. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Ikan;

Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya ikan
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya ikan ;
- penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya ikan;
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap dan pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI);



- penyiapan bahan rencana pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI);
 - penyiapan bahan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas;
 - penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) serta lembaga adat/kearifan lokal;
 - penyiapan bahan penyusunan pengelolaan analisis data statistik pelanggaran dan tindak pidana dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - penyiapan bahan pelaksanaan teknis perikanan tangkap dan pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI);
 - penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya ikan;
 - penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya ikan ;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bid ang tugasnya.
- c. Seksi Konservasi Perairan Umum Daratan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Seksi Konservasi Perairan Umum Daratan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang konservasi perairan umum daratan (PUD) dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konservasi Perairan Umum Daratan (PUD) dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang konservasi perairan umum daratan (PUD) dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
- penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang konservasi perairan umum daratan (PUD) dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
- penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang konservasi perairan umum daratan (PUD) dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) ;



- penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi fungsional kelembagaan adat dan kearifan lokal dan pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD);
- pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada pengolah dan pedagang ikan eceran, grosir dan ekspor;
- penyiapan bahan data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- penyiapan bahan pembinaan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pengolah ikan dan pedagang hasil perikanan serta Penggiat Konservasi sumber daya ikan (SDI);
- pelaksanaan fungsi pengawasan mutu ikan agar aman di konsumsi oleh masyarakat;
- penyiapan data teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan konservasi sumber daya ikan (SDI);
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang konservasi perairan umum daratan (PUD) dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) ;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang konservasi perairan umum daratan (PUD) dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP);
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	26	44
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	5	5
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	-	-	-
4	Tenaga Kontrak	18	13	31
	Total	36	31	80



Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 80 orang, terdiri dari 36 laki-laki (54%) dan 31 perempuan (45%). Komposisi ini menunjukkan bahwa Laki-laki masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi
Berdasarkan Pangkat
Golongan

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan IV				
	IV/D	-	-	
	IV/C	1	-	1
	IV/B	1	-	1
	IV/A	1	4	5
Golongan III				
	III/D	7	8	15
	III/C	1	2	3
	III/B	1	4	5
	III/A	5	13	18
Golongan II				
	II/D	-	-	
	II/C	1	1	2
	II/B	-	-	-
	II/A	-	-	-
	Golongan IX	-	-	-
	Total	18	32	50

Pada Tabel 2.2, Golongan III merupakan golongan yang paling dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di tahap menengah karir. Lebih rinci, mayoritas pegawai berada di Golongan III/D (30,77%), menandakan banyak pegawai telah mencapai ujung golongan ini dan menunggu promosi ke Golongan IV.



Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		CPNS		PPPK		NON ASN		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SMP Sederajat							2		2
2	SMA Sederajat		3					10	4	17
3	D3								2	2
4	S1	16	26		5			5	7	60
5	S2	1	1							2
6	S3									

Pada Tabel 2.3, mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan 60 orang (63%) berpendidikan sarjana (S-1) dan 2 orang (5%) telah melanjutkan ke jenjang pascasarjana (S-2). Hal ini menunjukkan bahwa SDM di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi termasuk berkualifikasi tinggi dan memiliki potensi untuk ditempatkan pada peran-peran strategis atau pengambilan keputusan. Sedangkan pendidikan menengah dan vokasi hanya mencakup 17 orang atau 22% dari total pegawai.

➤ Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung Kantor	4 unit	3 baik / 1 Rusak Ringan
2	Kendaraan Roda Empat	4 Unit	3 baik / 1 Rusak Ringan
3	Kendaraan Roda Dua	48 Unit	Baik
4	Kendaraan Roda	3 Unit	Rusak Ringan
RUANG KEPALA DINAS			
1	Kendaraan roda empat	1	baik
2	Meja kerja Ess II	1	baik
3	Kursi Kerja Ess II	1	baik
4	Laptop	1	Baik
5	Printer	1	Baik
6	Infokus	1	baik
7	Lemari arsip	1	baik



NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Lemari Kecil	1	baik
9	TV	1	baik
10	Kulkas	1	baik
11	Kursi lipat	2	baik
12	Tirai gorden	1	baik
13	Terali	1	Baik
14	AC	1	baik
15	Kursi Tamu	1 Set	baik
RUANG SEKRETARIAT			
1	Kendaraan Roda Empat	1	baik
2	Kendaraan Roda Dua	5 Unit	baik
3	Meja Biro	1	baik
4	Meja Kayu Lipat	4	baik
5	Meja Kerja	4	baik
6	Meja ½ Biro	2	baik
7	Kursi putar	1	baik
8	Kursi Lipat	14	baik
9	Lemari Kayu	6	baik
10	Filing Cabinet	4	baik
11	AC	1	baik
12	Tirai Gorden	1	baik
13	Brandkas	1	baik
14	Mesin Absen	2	baik
15	UPS	1	baik
16	PC Unit	2	baik
17	Printer	3	baik
18	Kipas Angin	1	baik
19	Dispenser	2	baik
20	Speaker/Salon	1	baik
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN			
1	Kendaraan Roda Dua	4 Unit	Baik
2	Meja ½ Biro	5 Unit	Baik
3	Kursi Putar	1 Unit	Baik
4	Kursi Lipat	8 Unit	Baik
5	Lemari Kayu	2 Unit	Baik
6	Filing Kabinet	2 Unit	Baik
7	Laptop	4 Unit	1 Baik / 3 Rusak
8	Printer	1 Unit	Rusak
9	AC	1 Unit	Baik
10	Kipas Angin	1 Unit	Baik
11	Tirai Gorden	1 Unit	Baik
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN			
1	Kendaraan Roda Dua	3 Unit	Baik
2	Meja Kerja	5 Unit	Baik
3	Meja Komputer	1 Unit	Baik
4	Meja Lipat	1 Unit	Baik
5	Kursi Putar	1 Unit	Baik
6	Kursi Lipat	7 Unit	Baik
7	Laptop	5 UnitUnit	Baik
8	Printer	3 Unit	Baik
9	Lemari	2 Unit	Baik
10	Filing Cabinet	2 Unit	Baik
11	PC Unit	1 Unit	Baik
12	AC	1 Unit	Baik
13	Dispenser	1 Unit	Rusak



NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kamera	1 Unit	Baik
15	Kipas Angin	1 Unit	Baik
16	Meja Komputer	1 Unit	Baik
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN			
1	Kendaraan Roda Empet	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	4 Unit	Baik
3	Meja ½ Biro	1 Unit	Baik
4	Mela Kerja	3 Unit	Baik
5	Kursi Putar	1 Unit	Baik
6	Kursi Lipat	8 Unit	Baik
7	Laptop	3 Unit	1 Baik / 2 Rusak
8	PC Unit	1 Unit	Baik
9	Printer	1 Unit	Baik
10	Kursi Plastik	4 Unit	Rusak
11	Lemari Kayu	2 Unit	Rusak
12	Filing Kabinet	5 Unit	Rusak
13	Rice Coocker	1 Unit	Rusak
14	Kipas Angin	2 Unit	Rusak
BIDANG PERIKANAN			
1	Kendaraan Roda Empat	1 unit	Rusak Ringan
2	Kendaraan Roda Dua	19 unit	Baik
3	Kendaraan Roda Tiga	1 unit	Baik
4	Meja Biro	2 unit	Baik
5	Meja ½ Biro	12 unit	9 Baik / 3 Rusak
6	Kursi Putar	5 unit	1 Baik / 4 Rusak
7	Kursi Lipat	1 unit	10 Baik
8	Kursi Plastik	4 unit	Rusak
9	Laptop	14 unit	8 Baik / 6 Rusak
10	PC	1 unit	Rusak
11	Printer	5 unit	3 Baik / 2 Rusak
12	Lemari	2 unit	Baik
13	Filing Cabinet	3 unit	Rusak
14	Kamera	2 unit	1 Baik / 1 Rusak
15	AC	3 unit	Baik
16	Dispenser	1 unit	Baik

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi menyusun dan menyajikan capaian kinerja serta capaian anggaran secara periodik seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. sebagai berikut :



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Kabupaten Sigi

NO.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan	%	N/A	58,04	58,07	60	N/A	41,27	41,2	Tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	N/A	109,12	110,49	111,88	N/A	101,22	108,98	Tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Ton	2.990,81	800	1.000	1.200	2.820,85	909,54	1.008,57	Tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	153	N/A	N/A	N/A	142	N/A	N/A	Tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Skor Pola Pangan Harapan	%	84,50	85,00	86,50	87,50	80,04	85,00	79,00	Tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	N/A



6	Persentase Penurunan Rasio Daerah Rawan Pangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	52,00	N/A	N/A	Tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	%	N/A	100	100	100	N/A	72,28	105,72	Tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	N/A



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.463.811.417	4.138.163.519	4.284.405.718	5.273.691.119
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	876.579.040	143.680.600	97.919.300	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.179.258.834	763.671.900	357.916.434	2.449.191.250
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	145.190.295	68.507.377	749.474.874	171.346.000
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	120.392.940	-	-	16.207.250
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.137.434.026	741.498.660	1.628.954.671	1.189.088.591
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.344.844.250	388.960.000	813.253.478	-



8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	27.932.250	82.350.000
9	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	775.000.000	-

No	Program	Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84,526,947.00	94,668,729.00	183,809,086.00	163,832,366.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	968,200.00	853,200.00	420,800.00	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5,249,240.00	491,400.00	649,654,474.00	52,428,005.00
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-450,000.00	0.00	-	321,000.00
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1,050,000.00	-	-	0.00
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6,735,700.00	373,216.00	3,349,394.00	38,921,932.00
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	27,054,114.00	493,968.00	1,125,000.00	-
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	100,000.00	100,000.00
9	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	6,664,000.00	-



No	Program	Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.06%	97.92%	96.38%	96.88%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	99.88%	99.29%	99.83%	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	99.53%	99.94%	63.99%	97.85%
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100.81%	100.00%	-	99.81%
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	98.35%	-	-	100.00%
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	99.44%	99.96%	99.78%	96.62%
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	97.50%	99.92%	99.83%	-
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	99.70%	99.88%
9	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	99.14	-



d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)

Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis dokumen perencanaan dan hasil kajian pembangunan daerah.

2. Perangkat Daerah Kabupaten Sigi

Sebagai pengguna utama dokumen perencanaan dan data hasil evaluasi pembangunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai mitra dalam pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan pembangunan.

4. Masyarakat

Terlibat secara tidak langsung melalui proses partisipatif perencanaan dan sebagai penerima manfaat akhir dari arah pembangunan yang ditetapkan.



5. Instansi Vertikal dan Mitra Pembangunan

Sebagai pengguna data, informasi, dan hasil kajian pembangunan daerah dalam sinergi program dan kebijakan lintas sektor.

2.2 Pemasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi yang timbul selama ini bersumber dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak terantisipasi.

Berdasarkan hasil pemanataan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, maka dapat diuraikan permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal dan masuk dalam kategori paling krusial, sebagai berikut :

1. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk;
2. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain;
3. Kemampuan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan mengakses pangan rendah karena daya beli dan kemampuan sumberdaya yang terbatas;
4. Cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah masih terbatas pada komoditi beras;
5. Pengembangan kelembagaan lumbung pangan belum berkelanjutan;
6. Dewan Ketahanan Pangan belum maksimal melakukan kegiatannya terutama dalam hal advokasi pangan;
7. Produsen (petani dan pengusaha) pangan segar belum menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dalam sistem usaha taninya sehingga sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat masih terdapat sebanyak 90 persen pangan segar yang beredar di masyarakat mengandung residu pestisida;



8. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan segar yang aman dikonsumsi, (B2SA);
9. Peningkatan kemampuan SDM Petani dan Aparat belum berjalan maksimal yang diakibatkan oleh kurangnya dana untuk kegiatan diklat, magang dan studi banding;
10. Produk Unggulan Daerah (PUD) yang bersumber dari pangan lokal belum berkembang dengan baik, karena tidak didukung oleh dana serta teknologi pengolahan hasil dan sistem pemasaran hasil produk.

Selain permasalahan-permasalahan di Bidang Ketahanan Pangan, juga terdapat beberapa permasalahan di bidang perikanan di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut :

1. Penurunan kesuburan perairan danau lindu;
2. Belum adanya tempat penangkaran benih ikan unggul;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penertiban dan pengawasan terhadap *illegal fishing*;
4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembudidayaan ikan bersama padi (mina padi);
5. Belum tersedianya pakan ikan yang berkualitas;
6. Masih kurangnya pembangunan sarana (saluran air) di beberapa kawasan potensial budidaya;
7. Masih kurangnya pengetahuan untuk pengolahan produksi perikanan ;
8. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan karena bahan baku dan bumbu yang mahal;
9. Masih kurangnya bantuan dana untuk peningkatan SDM bagi anak-anak nelayan dan pembudidaya ikan.

Mengingat luas dan beragamnya permasalahan di Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi yang dihadapi oleh daerah, serta terbatasnya sumber daya yang tersedia, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi menentukan fokus ketahanan pangan dan perikanan ke depan berdasarkan perwilayah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan. Fokus wilayah



pengembangan ketahanan pangan dan perikanan akan dibiayai oleh dana APBD.

Kabupaten Sigi pada umumnya adalah daerah pertanian. Perekonomiannya didominasi oleh kegiatan sektor primer khususnya pertanian dalam arti luas. Di bidang pertanian masyarakat mengusahakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pencapaian sasaran strategis pemantapan ketahanan pangan yang ditetapkan, dilaksanakan melalui jalur ganda yaitu : (1) membangun pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan/daya beli, dan (2) memenuhi kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui dana bantuan sosial serta pemberdayaan agar semakin mampu mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri.

Dalam rangka mengoptimalkan pendekatan jalur ganda diatas, yang perlu dilaksanakan adalah menggerakkan seluruh komponen bangsa, pemerintah, masyarakat/LSM, organisasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial dan pelaku usaha secara aktif, sinergi dan terkoordinir.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi yang telah dijabarkan dalam PP nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pangan belum diikuti secara signifikan diikuti oleh peningkatan produk pangan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok pada setiap jenis tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan antara lain.



1. Distribusi pangan yang tidak merata :
 - ❖ Belum teridentifikasinya infrastruktur distribusi pangan;
 - ❖ Belum terkoordinasinya tim distribusi pangan;
 - ❖ Belum adanya standar dan bahan pola pengembangan distribusi pangan;
 - ❖ Belum dilaksanakan pemantauan tentang distribusi pangan antar kecamatan antar musim antar daerah;
 - ❖ Belum terkoordinasinya pemantauan dan pengamanan kebijakan harga dasar pangan dan harga pangan yang layak bagi masyarakat.
2. Semakin tingginya alih fungsi lahan yang dapat menurunkan ketersediaan pangan;
 - ❖ Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian masalah pangan dan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
 - ❖ Belum teridentifikasinya daerah rawan pangan;
 - ❖ Belum terlaksananya pemantauan pengamanan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan, komoditas prioritas daerah rawan pangan.
3. Masih rendahnya modal para petani untuk memproduksi pangan ;
 - ❖ Belum teridentifikasinya potensi sumber daya dan produksi pangan serta kerawanan konsumsi pangan masyarakat;
 - ❖ Belum optimalnya pembinaan pada masyarakat dalam memanfaatkan produk berbahan baku pangan lokal;
 - ❖ Belum maksimalnya pengawasan produk pangan segar dan produk pangan industri rumah tangga.



Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Sigi Periode 2025-2029

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan	Pola distribusi pangan yang belum seimbang	Belum optimalnya distribusi . Akses dan cadangan pangan
2	Ketersediaan pangan belum memenuhi kondisi ideal dan masih terdapat wilayah dengan kategori rentan pangan	Akses pangan bagi masyarakat miskin baik kronik maupun transien belum terjamin	Penanganan daerah rawan pangan kronik maupun transien belum maksimal
		Cadangan Pangan Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat belum berkembang	Kesadaran akan pentingnya cadangan pangan belum tertanam pada aparat dan Kelompok Tani
		Kinerja kelembagaan pangan baik Dewan Ketahanan Pangan maupun Kelompok Tani belum optimal	Pembinaan dan penyuluhan kepada kelembagaan petani belum optimal



3	Distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah belum optimal	Belum optimalnya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga	Kondisi topografi di beberapa wilayah sulit dijangkau
		Akses distribusi dan mobilitas pangan belum sepenuhnya terpantau	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang Ketahanan Pangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketersediaan Infrastruktur Dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan Belum Memenuhi Kebutuhan Petani Di Desa Dan Banyaknya Desa Ketergantungan Rentan Rawan Pangan	- Infrastruktur Dan Sarana Masih Kurang Sehingga Ketersediaan Pangan Rendah - Infrastruktur Banyak Rusak Akibat Bencana	Kurangnya Jumlah Alsintan, dan Sarana Produktif Pertanian Di Desa Rawan Pangan
2	Keterpangan Belum Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Banyaknya Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Ketersediaan Pangan Masih Rendah	- Jumlah Produksi Pangan Masih Rendah - Pendapatan Petani Masih Rendah
3	Belum Terpenuhinya Kebutuhan Nilai Gizi Makanan Yang Ada Di	Masih Tinggi Jumlah Anak Stunting	- Kesadaran Akan Pentingnya Gizi Makanan Oleh Masyarakat Masih Rendah



	Masyarakat		- Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Petani Belum Optimal
--	------------	--	---

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konsumsi gizi rumah tangga	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi dalam konsumsi rumah tangga	Kurangnya sosialisasi tentang pemenuhan gizi konsumsi rumah tangga
	Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman)	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman)	Kurangnya sosialisasi tentang pangan B2SA
2	Keamanan pangan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan	Kurangnya sosialisasi tentang keamanan pangan
3	Penganekaragaman pangan	Rendahnya minat anggota kelompok untuk bekerja sama dalam berusaha tani	Rendahnya SDM anggota kelompok
		Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang manfaat pekarangan pangan lestari (P2L)	Kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan pekarangan
		Kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat pangan organik	Kurangnya sosialisasi tentang pangan organik



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Air tidak ada	Irigasi Gumbasa Belum Berfungsi / belum di perbaiki akibat gempa 2018	Saluran Irigasi Tersier Yang masuk ke kolam rusak akibat Gempa 2018
2.	Bangunan Perikanan banyak yg rusak	Belum di Perbaiki / Belum direhab	Keterbatasan anggaran
3.	Kolam Balai Benih Banyak yang rusak	Belum di perbaiki / Belum direhab	Keterbatasan anggaran
4.	Nilai produksi tangkapan ikan mujair Danau Lindu rendah	Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku	Tingginya penggunaan alat tangkap ikan dengan mata jaring 2 inch

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, berbagai permasalahan pembangunan bidang ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi ditinjau dari gambaran visi, misi, program unggulan dan program lintas sektor kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama artinya perhitungan yang dilakukan untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan Pangan Utama (Beras) untuk memenuhi Kebutuhan Pangan suatu daerah baik dari pasokan dan dalam daerah.
2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengembangan Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi masalah pangan seperti kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kabupaten) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/Kn. 130/4/2018.
3. Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya dan dalam upaya mendukung Program Aksi Penurunan Stunting.
4. Peningkat Skor Pola Pangan Harapan, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik



jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

5. Tingkat pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan relatif masih kurang, sehingga perlu untuk memprioritaskan kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknis pengelolaan usaha perikanan berbasis kelompok sebagai wadah pengembangan usaha.
6. Pemanfaatan lahan budidaya perikanan belum optimal disebabkan oleh masih terkendala kondisi fisik kolam, ketersediaan prasarana dan sarana saluran irigasi, jalan Usaha Perikanan, serta belum optimalnya cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), sehingga produktifitas usaha relatif masih rendah.
7. Kualitas produk perikanan baik segar maupun olahan relatif masih rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam penanganan produk perikanan sehingga mutu produk (syarat teknis, sanitasi dan higienis) dapat terjaga dengan baik. Untuk mengoptimalkan nilai produk perikanan perlu dilakukan menerapkan sistem rantai dingin dan diversifikasi produk olahan untuk menghasilkan nilai tambah dan peningkatan pendapatan.



Berdasarkan uraian beberapa masalah strategis diatas maka dapat di simpulkan bahwa semua permasalahan tersebut bermuara kepada kualitas di bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan secara menyeluruh baik itu di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan juga serta dari bidang pengolahan, pengawasan sampai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sehingga dapat dirumuskan bahwa isu strategis yang akan di di angkat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi adalah masih rendahnya Kualitas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sigi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2030

Dalam periode 2025–2029, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi menetapkan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor tujuan Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB daerah secara berkelanjutan, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan tujuan yaitu “Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan perikanan, yakni:

1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan, dengan indikator sasarnya adalah :
 - ✓ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - ✓ NTN Perikanan Tangkap
 - ✓ NTPi Perikanan Budidaya
 - ✓ Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
 - ✓ Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
2. Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator sasarannya adalah :
 - ✓ Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
 - ✓ Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan)
 - ✓ Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
 - ✓ Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.



TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi tahun 2025-2030

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,86	81,67	82,49	83,31	84,14	84,99	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Ton	130	135	140	150	155	160	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85,8	88,6	91,5	94,3	95	100	



NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	40,76	40,35	39,95	39,55	39,15	38,76	
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	NTN Perikanan Tangkap	Nilai	105.00	105.11	105.21	105.32	105.42	105.53	
			NTPi Perikanan Budidaya	Nilai	104.00	104.10	104.21	104.31	104.42	104.52	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	87,05	87,25	87,5	87,75	88,01	88,3	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	894,71	921,55	949,19	977,66	1.006,98	1.037,18	



3.1 STRATEGI RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan atau prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Strategi yang direncanakan dengan melaksanakan urusan pemerintah bidang pangan, urusan pemerintah bidang perikanan.

Strategi ini merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Agar mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka strategi dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



TABEL 3.2
Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pendataan pelaku dan potensi perikanan, serta pelatihan dasar budidaya.	Penyediaan sarana produksi dan peningkatan kapasitas teknis pembudidaya.	Penerapan teknologi budidaya dan penangkapan ramah lingkungan.	Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan akses pasar lokal.	Hilirisasi produk perikanan dan perluasan pemasaran berbasis digital.
Pendataan pelaku budidaya ikan air tawar dan pemetaan potensi kolam/empang desa, serta kebutuhan sarana produksi dasar seperti benih, pakan, dan peralatan sederhana.	Penyediaan sarana produksi secara bertahap (melalui program bantuan dan swadaya) dan pelatihan teknis budidaya ikan air tawar berbasis lokal (lele, nila, patin).	Introduksi teknologi budidaya ramah lingkungan seperti bioflok, sistem kolam terpal, dan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan alternatif.	enguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) untuk meningkatkan efisiensi produksi, akses bahan baku, dan distribusi hasil panen.	Evaluasi hasil produksi, pelatihan pengolahan hasil perikanan (abon, kerupuk, fillet), dan fasilitasi sertifikasi mutu untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
Pendataan pelaku usaha perikanan, pemetaan rantai pasok, dan sosialisasi program kemitraan dan koperasi.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi perikanan serta pelatihan manajemen usaha dan pemasaran.	Fasilitasi perizinan usaha dan legalitas produk hasil perikanan serta peningkatan akses ke lembaga pembiayaan.	Pengembangan kemitraan dengan pelaku industri, hotel, restoran, dan pasar lokal/regional.	Evaluasi kinerja kelembagaan, penguatan sistem perlindungan usaha, dan ekspansi akses pasar berbasis digital.
Identifikasi lahan pertanian yang terdampak bencana dan potensi untuk pencetakan sawah baru, merancang program rehabilitasi, penyediaan sarana produksi, serta penguatan lumbung pangan desa untuk mendukung ketahanan pangan.	Melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian terdampak dan memulai pencetakan sawah baru di area potensial, serta menyediakan sarana produksi seperti benih unggul dan pupuk, sambil memberikan pelatihan kepada petani.	Memberikan pendampingan teknis kepada petani dalam mengelola lahan dan hasil pertanian, serta memperkuat pengelolaan lumbung pangan desa untuk penyimpanan cadangan pangan lokal yang dapat digunakan saat diperlukan.	Meningkatkan infrastruktur pertanian dan mendorong petani untuk melakukan diversifikasi tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, sambil memperkuat sistem distribusi dan pasar lokal.	Melakukan evaluasi terhadap program rehabilitasi dan pencetakan sawah baru, memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan cadangan pangan yang efisien.



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penyusunan Rencana Sistem Informasi Dengan menyusun kerangka kerja pengembangan sistem informasi terintegrasi Untuk transparansi anggaran pembangunan dan mengidentifikasi riset serta inovasi yang relevan.	Pengembangan Infrastruktur dan Basis Data Dengan Membangun infrastruktur sistem informasi dan menyusun basis data riset untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	mplementasi dan Pengujian Sistem Dengan Mengimplementasi kan dan menguji sistem informasi terintegrasi serta menerapkan riset dan inovasi dalam Perencanaan pembangunan.	Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Kebijakan Dengan Meningkatkan kapasitas pengguna sistem dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dihasilkan berbasis riset dan inovasi.	Optimalisasi Sistem dan Penyempurnaan Kebijakan Dengan Mengoptimalkan sistem informasi dan memperbarui basis data riset, Serta menyempurnakan kebijakan untuk Menghadapi Tantangan Pembangunan masa depan.



3.2 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan uraian diatas tujuan, sasaran, strategi, urusan dan kebijakan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Mengimplementasikan Program Sigi Masagena (Sistem Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Sigi) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan akses ke modal usaha. Program ini akan mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif lokal dengan memperluas jaringan pasar untuk produk lokal.	Mengimplementasikan Program Sigi Masagena (Sistem Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Sigi) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan akses ke modal usaha. Program ini akan mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif lokal dengan memperluas jaringan pasar untuk produk lokal.	
		Membangun dan memperbaiki infrastruktur ekonomi di wilayah-wilayah miskin ekstrem, seperti memperbaiki akses transportasi ke pasar, meningkatkan fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Menyediakan akses pembiayaan untuk usaha kecil dan sektor pertanian melalui program pinjaman berbunga rendah atau	Membangun dan memperbaiki infrastruktur ekonomi di wilayah-wilayah miskin ekstrem, seperti memperbaiki akses transportasi ke pasar, meningkatkan fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Menyediakan akses pembiayaan untuk usaha kecil dan sektor pertanian	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		tanpa bunga.	melalui program pinjaman berbunga rendah atau tanpa bunga.	
		Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan melalui pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan yang ramah lingkungan, penguatan kapasitas produksi, serta pengembangan akses pasar dan kelembagaan usaha perikanan.	Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan melalui pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan yang ramah lingkungan, penguatan kapasitas produksi, serta pengembangan akses pasar dan kelembagaan usaha perikanan.	
		Penguatan akses pasar dan perlindungan usaha nelayan serta pembudidaya melalui kemitraan, koperasi perikanan, dan fasilitasi perizinan serta pembiayaan usaha.	Penguatan akses pasar dan perlindungan usaha nelayan serta pembudidaya melalui kemitraan, koperasi perikanan, dan fasilitasi perizinan serta pembiayaan usaha.	
		Optimalisasi dan rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana dan pencetakan sawah baru di wilayah potensial didukung penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, serta penguatan lumbung pangan desa, untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan berkualitas yang terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat..	Optimalisasi dan rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana dan pencetakan sawah baru di wilayah potensial didukung penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, serta penguatan lumbung pangan desa, untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan berkualitas yang terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat..	



No	Operasionalisas i NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Penerapan Teknologi Dan Perencanaan Berbasis Riset dan Inovasi Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk transparansi dan pengawasan anggaran pembangunan, serta mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Pendekata n berbasis riset dan inovasi ini bertujuan untuk menghadapi tantangan Pembangunan secara lebih adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Penerapan Teknologi dan Perencanaa n Berbasis Riset dan Inovasi Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk transparansi dan pengawasan anggaran pembangunan, serta mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Pendekata n berbasis riset dan inovasi ini bertujuan untuk menghadapi tantangan pembangunan secara lebih adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	
		Peningkatan Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah meliputi penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan universitas untuk menghasilk a n solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, hasil riset akan diintegrasika n dalam	Peningkatan Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah meliputi penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan universitas untuk menghasilk a n solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, hasil riset akan diintegrasika n dalam	



		n perencanaan pembangunan untuk memastikan kebijakan berbasis data. Penggunaan teknologi juga didorong untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta layanan publik, mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.	n perencanaan pembangunan untuk memastikan kebijakan berbasis data. Penggunaan teknologi juga didorong untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta layanan publik, mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.	
--	--	---	---	--



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan pada tahun 2025-2029 yang di rencanakan akan dijabarkan kembali dalam beberapa Sub Kegiatan. Dengan adanya program/ kegiatan/ sub kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah- langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.



Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
		Meningkatnya Ketahanan Pangan			Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan)		
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)		



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		
		Meningkatnya pengelolaan sektor Perikanan Air Tawar			1. NTN Perikanan Tangkap		
					2. NTN Perikanan Budidaya		
					3. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
			Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan		Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JumlahDokumenRKA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumenPerubahanRKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	JumlahDokumenDPA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KoordinasidanPenyusunanDPA SKPD	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	JumlahDokumenPerubahanDPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				TersedianyaGaji danTunjangan ASN	JumlahOrangyangMenerimaGaji dan Tunjangan ASN	PenyediaanGaji danTunjangan ASN	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JumlahDokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan AkhirTahunSKPDdanLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanKeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah LaporanKeuanganAkhir Tahun SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuanganAkhir Tahun SKPD	
				Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sdministrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	
				Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan RapatKoordinasidanKonsultasi	Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen PengadaanBarangMilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen PengadaanBarangMilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PengadaanBarangMilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JumlahLaporanPenyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	
				Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Sinkronisasi Koordinasi dalam dan rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota yang tersedia	Penyediaan infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	JumlahKeluarga yangMengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan TingkatProdusendanKonsumen di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen danKonsumen di Kabupaten/kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
				Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabupaten/kota	Informasi harga pangan tingkat ProdusendanKonsumenwilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	InformasiPrognosaNeracaPangan Wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Koordinasi dan Sinkronisasi PemantauanStok, Pasokandan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	



				Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	InformasiNeracaBahanMakanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	



				Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah kab/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan EvaluasiKonsumsi PerKapita Pertahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di mutahirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
						PenangananKerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakupdalam1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, danPenyaluranCadanganPangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakupdalam1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakupdalam1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi PenangananKerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
				Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kot	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/kota	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianyadokumenpenguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaanpengawaskeamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan danmutu pangan segar asal tumbuhan	
						Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	
				Terlaksananya Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaankeamananpanganbagi pelakuusahakecildanmikroYang Dilaksanakan	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	



						PengelolaanPenangkapanIkandi WilayahSungai,Danau,Waduk, Rawa,danGenanganAirLainnya yangDapatDiusahakandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8



				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8



						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8



				Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana PemberdayaanUsaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Penyediaan Sarana dan Prasarana PemberdayaanUsaha Nelayan Skala Kecil	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8



			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
						Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	JumlahKelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	JumlahKelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan danPengembangan Kelembagaan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8



				TerlaksananyaFasilitasiBantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, sertaPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, sertaPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8



						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PenjaminanKetersediaanSarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	PengelolaanKesehatan Ikandan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				TerbinanyaPembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan PemantauanPembudidayaan Ikan di Dara	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	LuasLahanuntukPembudidayaan IkandiDarat yangDirencanakan, Dikembangkan,Dimanfaatkandan Dilindungi	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				TerlaksananyaPerencanaan,dan Pengembangan PemanfaatanAir untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan, dan Pengembangan PemanfaatanAir untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Meningkatnya kelestarian Danau dan keanekaragaman hayati		Luasan Kawasan Konservasi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTANDAN PERIKANAN	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penerbitan TandaDaftar Usaha PengolahanHasilPerikananbagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				TersedianyaDatadan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	JumlahDatadanInformasiUsaha PemasarandanPengolahanHasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	PenyediaanData dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan dan Penyaluran BahanBakuIndustriPengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				MeningkatnyaKetersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JumlahPeningkatanKetersediaan IkanuntukKonsumsi danUsaha PengolahanDalam1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				TerlaksananyaPembinaanteknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya fasilitasi akses pasar danpromosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikanuntukskalausaha mikro dan skala usaha kecil	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usahamikro dan skala usaha kecil	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlahunitpengolahanikandan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	Revitalisasiunitpengolahanikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	



Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	



4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antar berbagai sektor dan stakeholders.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan **RPJMD** dengan **RKPD** dan **Renstra Perangkat Daerah**, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2030, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian	100	100		100		100		100		100		
Perencanaan,Pengang garan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Pengangg aran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunandokumen Perubahan RKA SKPD	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	JumlahDokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	1		1		1		1		1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44	44		44		44		44		44		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sdministrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1		1		1		1		1		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan komponen instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
listrik/penerangan bangunan kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3		3		3		3		3		
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4		4		4		4		4		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4		4		4		4		4		
Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4		4		4		4		4		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1		2		2		2		2		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	1		2		2		2		2		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2	2		2		2		2		2		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	3		3		3		4		4		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,SumberDa ya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4		4		4		4		4		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4		4		4		4		4		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	47		47		47		47		47		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10		10		10		10		10		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100	100	96.708.138	100	98.642.301	100	100.615.147	100	102.627.450	100	104.679.999	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PANGAN													
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Sinkronisasi Koordinasi dalam dan rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik												
Penyediaan infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota yang tersedia												



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	85.8	88,6	306.871.5 90	91,5	313.009.0 22	94,3	319.269.2 02	95	325.654.5 86	100	332.167.6 78	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													
Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia												
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya												



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen danKonsumen di Kabupaten/kota												
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal												
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan												
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan												
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat ProdusendanKonsumen wilayah Kabupaten/Kota												



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	InformasiPrognosaNeracaPangan Wilayah Kabupaten/Kota												
Koordinasi dan Sinkronisasi PemantauanStok, Pasokandan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis												
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan												
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	InformasiNeracaBahan Makanan (NBM)												
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota													



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota												
PemeliharaanCadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan PemerintahKabupaten/ Kota yang terpelihara												
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota												
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara												
Penentuan Harga Minimum DaerahuntukPanganL okalyang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan													



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pemerintah Provinsi													
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal												
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi													
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun												
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal												



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan EvaluasiKonsumsi PerKapita Pertahun												
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	100	100	23.485.50 0	100	23.955.21 0	100	24.434.31 4	100	24.923.00 0	100	25.421.46 0	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun												
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di mutahirkan												
PenangananKerawana n Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota													



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakupdalam1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, danPenyaluranCadanga nPangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakupdalam1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota												
Koordinasi dan Sinkronisasi PenangananKerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4	4		4		4		4		4		
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi												
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100	100	35.816.790	100	36.533.126	100	37.263.788	100	38.009.064	100	38.769.245	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota													
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	4		4		4		4		4		
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan												
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4	4		4		4		4		4		
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4	4		4		4		4		4		
Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro													
Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	87.05	87,25	1.870.155.500	87.50	1.907.558.610	87,75	1.945.709.782	88,01	1.984.623.978	88.30	2.024.316.457	
Pengelolaan Penangkai Wilayah Sungai, Danau,													



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Waduk, Rawa,danGenanganAir Lainnya yangDapatDiusahakan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
PenyediaanData dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan DaratdalamSatuKabup aten/Kota yang Tersedia												
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia												
PenjaminanKetersediaa nSarana Usaha Perikanan Tangkap	JumlahSaranaUsaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia												
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	110		120		130		140		150		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yangDifasilitasiPembent ukandan Pengembangan Kelebagaannya	5	5		7		9		10		12		
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha												
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Penyediaan Sarana dan Prasarana PemberdayaanUsaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	894.71	921.55	210.630.000	949.19	214.842.600	977.66	219.139.452	1.006.98	223.522.241	1.037.18	227.992.686	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil													
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	JumlahKelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20	20		22		24		26		30		
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	JumlahKelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan danPengembangan Kelembagaan	20	20		22		24		26		30		
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya												
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses	4	4		5		6		7		8		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Informasi, sertaPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan													
PenyediaanData dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota												
PenjaminanKetersediaa nSarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
PengelolaanKesehatan Ikandan Lingkungan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya												



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan												
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan PemantauanPembudida yaan Ikan di Dara												
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	LuasLahanuntukPemb udidayaan IkandiDarat yangDirencanakan, Dikembangkan,Dimanf aatkandan Dilindungi												
Perencanaan, dan Pengembangan PemanfaatanAir untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat												
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTANDAN	Luasan Kawasan Konservasi	4.1	5	50.000.00 0	6	51.000.00 0	6,1	52.020.00 0	6.3	53.060.40 0	6.5	54.121.60 8	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PERIKANAN													
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,Danau,Waduk, Rawa,dan GenanganAirLainnyaya ngDapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota												
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di WilayahSungai,Danau, Waduk, Rawa,danGenanganAir Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, danGenanganAir Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota												
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	67.43	69.12	50.000.000	70.89	51.000.000	72.15	52.020.000	74.23	53.060.400	76.18	54.121.608	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penerbitan TandaDaftar Usaha PengolahanHasilPerik ananbagi Usaha Skala Mikro dan Kecil													
PenyediaanData dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JumlahDatadanInforma siUsaha PemasarandanPengolah anHasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko												
PembinaanMutudanK eamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil													
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau StandarpadaUsahaPen golahan danPemasaranSkalaMi krodan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau StandarpadaUsahaPeng olahan danPemasaranSkalaMi krodan Kecil												



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan dan Penyaluran BahanBakuIndustriPe ngolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JumlahPeningkatanKet ersediaan IkanuntukKonsumsi danUsaha PengolahanDalam1(Sat u)Daerah Kabupaten/Kota												
PemberianFasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro danKecildalam1(Satu)D aerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi												
Pembinaan teknis usaha pengolahandanpemas aranikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil													



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil												
Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil													
Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usahamikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikanuntukskalausaha mikro dan skala usaha kecil												
Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan													



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
skala usaha kecil													
Revitalisasi unit pengolahan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi												
Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil													
Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil												



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2025	TARGET DAN PAGU										Ke t.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16



4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan *stakeholder* terkait. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis kondisi daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah, musrenbang, serta penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Pentingnya penguatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah juga menjadi prioritas dalam sub kegiatan ini. Dengan meningkatkan Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan dengan Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Cadangan Pangan dan Meningkatnya Produksi Perikanan dan diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap permasalahan daerah dan potensi unggulan yang ada.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan, dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, analisis data, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.



Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Penyediaan infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
			Pemantauan Stok Pangan	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi PemantauanStok, Pasokandan Harga Pangan Pokok Strategis	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			PenangananKerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/kota	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	
			Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana PemberdayaanUsaha Nelayan Skala Kecil	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTANDAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian Danau dan keanekaragaman hayati	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	



4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 mencakup dua sasaran indikator utama, yaitu NTN Perikanan Budidaya dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari semua komoditas unggulan dalam bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas perencanaan dan penerapan inovasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	104.00	104.10	104.21	104.31	104.42	104.52	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80.86	81.67	82.49	83.31	84.14	84.99	



4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian yang sangat vital untuk memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan serta program pembangunan daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur seberapa baik kinerja setiap elemen yang terlibat dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan inovasi di tingkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selain itu, penekanan pada riset dan inovasi sebagai bagian dari pengembangan potensi unggulan daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Dengan menggunakan IKK ini, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi akan dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan
Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	80,86	81,67	82,49	83,31	84,14	84,99	
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,11	105,21	105,32	105,42	105,53	105,63	
3	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	Angka	104,1	104,21	104,31	104,42	104,52	104,63	



BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sigi.

Rancangan Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Rancangan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dimana bersama dengan Kepala Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan melalui Renja Dinas setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan setiap tahun.

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Sigi dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan dasar evaluasi laporan atas Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan beserta jajarannya, sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggung jawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada Bupati Sigi Tahun 2025-2029.

Semoga Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan yaitu **“KABUPATEN SIGI, MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA ”**.

Sigi, 30 September 2025

**Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Kabupaten Sigi**

MOHAMAD AKIB, S.Pt
NIP. 19711201 199903 1 006

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

